

PENETAPAN RENJA TAHUN ANGGARAN 2019 (RENJA)



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI**

Tahun 2019



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/ /DISHUB- BKT/ 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja- SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4)
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a"i diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2019

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008, perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
12. Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 32 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Prov. Sumbar Tahun 2019 ;

13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi;
14. Peraturan WaliKota Bukittinggi No 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;.
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 tahun 2017 tentang perubahan Rencana Strategis Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
16. Perraturana Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2019;
- Kedua : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : Agustus 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BUKITTINGGI



Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M.Si

NIP. 196302031986031034

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (renja) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2019, Keberadaan Renja Dinas Perhubungan ini dibuat dalam rangka Pelaksanaan Program, kegiatan, kebijaksanaan yang telah dirumuskan didasarkan kepada visi dan misi organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, dan tidak lepas dari visi dan misi pemerintah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kota Bukittinggi.

Semoga penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2019 ini akan dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi bersama unit kerja, dinas dan instansi terkait serta perangkat kota dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, Juli 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI**



Drs.ELVI SAHRI MUNIR, M.Si
NIP : 1963 03021986031034

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	1
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
	1.4. SISTIMATIKA PENULISAN	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	7
	2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD	22
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	26
	2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	30
	2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	38
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN.....	39
	3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	39
	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	40
	3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	42
BAB IV	PENUTUP	44

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. PERENCANAAN STRATEGIS (FORMULIR RS)
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (FORMULIR RKT)
3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (FORMULIR PKK)
4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (FORMULIR PPS)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini merupakan dasar pijakan bagi ASN Dishub dalam melaksanakan segala aktivitas Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2019, yang mengacu kepada Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas dan Kegiatan yang telah ditetapkan

Berbagai program dan kegiatan disusun secara optimal untuk, guna mewujudkan transportasi Kota Bukittinggi yang aman, tertib dan lancar sebagai pendukung potensi unggulan kota, baik berupa pembinaan, penyuluhan, penertiban maupun penyediaan fasilitas penunjang kenyamanan dan keselamatan lalu lintas

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam menyusun Renja-SKPD Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008, perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
12. Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 32 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Prov. Sumbar Tahun 2019
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi;

14. Peraturan WaliKota Bukittinggi No 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 tahun 2017 tentang perubahan Rencana Strategis Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah memantapkan keberadaan, posisi serta peranan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2019 sebagai salah satu SKPD yang mengemban fungsi perhubungan, yang lebih profesional, arif dalam menyikapi perubahan internal maupun eksternal dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan kota Bukittinggi

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD

1.4. Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja SKPD, serta susunan garis besar isi diokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun- tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indicator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan dan temuan-temuan setelah proses tersebut serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan penjelasan proses usulan program/kegiatan diperoleh dari pemangku kepentingan, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan serta sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan .

3.4. Jumlah Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam Renja
2019

BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. P E N U T U P

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi pada tahun 2018 dilaksanakan terdiri dari 8 Program dengan 29 Kegiatan, adapun program yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan.
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ.
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Realisasi Rencana Kerja SKPD tahun 2017 pada umumnya dapat dilaksanakan sesuai dengan target sehingga dari 39 kegiatan dan 10 program dapat terlaksana sesuai dengan anggaran yang tersedia dapat dilihat sebagai berikut :

A. BIDANG LALU LINTAS DAN PARKIR :

Pada Bidang ini terdiri dari 4 (empat) Program dan 10 Kegiatan yaitu :

1. Program Pembangunan dan fasilitas Perhubungan terdiri dari 3 Kegiatan :
 - a. Pengadaan rambu lalulintas, kegiatan ini adalah Pengadaan 1 paket Cermin tikung dengan capaian kinerja 100 %
 - b. Pengadaan Road Barrier, kegiatan ini adalah pengadaan 1 paket Road Barierr dengan capaian kinerja 100 %

- c. Pengadaan Rabber Speed Humm, kegiatan ini adalah pengadaan 1 paket Rabber Speed Humm dengan capaian kinerja 100 %
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalulintas terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalulintas, kegiatan ini merupakan pemeliharaan rambu-rambu lalulintas baik yang bersuar dan tidak bersuar dan pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa rambu dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 100 %
 - b. DAK Bidang Transportasi Darat kegiatan ini merupakan pengadaan dan pemasangan Marka jalan, Rambu tidak bersuar, Pengadaan Road Barrier dan Trafick cone, kegiatan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan capaian kinerja 100 %
3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas terdiri dari 4 kegiatan yaitu :
 - a. Lomba Tertib lalulintas, kegiatan ini merupakan lomba tertib lalulintas yang mana bukittinggi dapat meraih piala WTN tahun 2017 dengan capaian kinerja 100 %
 - b. Penerangan dan penyuluhan lalulintas, kegiatan ini merupakan memberikan penyuluhan kepada siswa SLTA tentang keselamatan dan kelancaran berlalulintas.
 - c. Pemilihan pelopor keselamatan dan kelancaran berlalulintas, kegiatan ini adalah pemilihan 3 orang pelajar dari 30 orang untuk mewakili Bukittinggi ketingkat Propinsi, dengan capaian kinerja 100 %
 - d. Pengawasan dan pengendalian lalulintas, kegiatan ini adalah pengendalian lalulintas di jalan dengan capaian kinerja 100 %.

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- a. Pembangunan Zona Selamat Sekolah, kegiatan ini adalah Pembangunan 1 (satu) paket ZOSS pada sekolah yang rawan kecelakaan, dengan capaian kinerja 100 %.

Dari 4 (empat) Program dan 10 kegiatan semua dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

B. BIDANG ANGKUTAN

Bidang Angkutan terdiri dari 1 Program dan 6 kegiatan yaitu :

- a. Pemilihan Awak angkutan umum teladan, kegiatan ini merupakan awak angkutan yang berprestasi yang akan mewakili Bukittinggi untuk pemilihan tingkat propinsi, dan untuk tahun 2017 Bukittinggi berhasil mewakili Sumbar untuk tingkat nasional, dengan capaian kinerja 100 %
- b. Pemilihan bagi para supir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang, kegiatan ini merupakan peningkatan pengetahuan supir/juru mudi untuk tentang keselamatan berlalulintas, dengan capaian kinerja 100 %
- c. Pengadaan stiker papan Trayek Angkutan bagi peningkatan keselamatan penumpang, kegiatan ini merupakan pembuatan stiker untuk trayek angkutan sebanyak 539 angkutan kota, dengan capaian kinerja 100 %.
- d. Evaluasi Kinerja Angkutan Umum, kegiatan ini adalah merupakan satu dokumen tentang gambaran kinerja angkutan umum dan faktor muat dan menghasilkan satu dokumen, kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena gagal tender, sedangkan kegiatan pendukung dapat dilaksanakan, kinerja kiatan ini hanya tercapai 25 %.
- e. Pembinaan pengemudi angkutan tidak bermotor, kegiatan ini merupakan memberikan penyuluhan kepada kusir bendi dan becak, capaian kinerja ini 100 %

C. UPTD TERMINAL DAN PARKIR.

Pada Bidang UPTD Terminal dan Parkir terdiri dari satu program dan 2 kegiatan yaitu :

- b. Peningkatan pengelolaan terminal dan parkir, kegiatan ini merupakan pengelolaan terhadap terminal dan parkir baik untuk Jukir maupun kebutuhan untuk terminal dan Parkir, capaian kinerja ini 100 %.
- c. Penunjang Operasional Administrasi UPTD Terminal dan Parkir, kegiatan ini merupakan administrasi untuk operasional Terminal dan parkir, dan capaian kinerja untuk kegiatan ini 70 % karena salah satu sub. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena kesalahan dalam penempatan rekening.
- d. Pengelolaan Gedung Parkir, kegiatan ini merupakan pengelolaan 2 buah Gedung parkir yaitu gedung parkir roda dua dan roda 4, capaian kinerja kegiatan ini adalah 100 %

D. UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pada UPTD Pengujian Kendaraan bermotor terdiri dari satu program dan satu kegiatan yaitu :

- a. Penunjang Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor, kegiatan ini merupakan Operasional PKB satu tahun, capaian kinerja kegiatan 100 %

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi dengan 1 tujuan, 4 sasaran, 8 strategi dan 14 kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2016- 2021(Renstra Dishub dalam revisi). Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2018
KOTA BUKITINGGI

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tw. 1 tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02.09.01			NAMA PERANGKAT DAERAH									
1	02.09.01			URUSAN PERHUBUNGAN									
1	02.09.01	001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	661	98%	97	97	100%	100	292	49%
1	02.09.01	001	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai , buku cek dan materai teran yang terbeli		4 Item	4 Item	4 Item	100%	4 item	12	
1	02.09.01	001	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik terbayar		36 rekening	36 rekening	36 rekening	100%	36 rekening	108	
1	02.09.01	001	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan terpelihara		6 roda 4	6 roda 4	6 roda 4	100%	6 roda 4	18	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

				Dinas/ Operasional									
							12 roda 2	12 roda 2	12 roda 2	100%	12 roda 2	36	
1	02.09.01	001	08	Penyediaan Jasa dan Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	
1	02.09.01	001	09	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	
1	02.09.01	001	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK terbeli		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	
1	02.09.01	001	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	
1	02.09.01	001	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan kantor		1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3	
1	02.09.01	001	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat tamu dan lembur yang tersedia		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	
1	02.09.01	001	18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat koordinasi yang diikuti		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	
1	02.09.01	001	19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa non PNS dan iuran BPJS NON pns		12 orang	12 orang	12 orang	100%	12 orang	36	
1	02.09.01	001	31	Pelaksanaan Program Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa, PPHP, PTK, PPK yang dibayarkan		12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36	
1	02.09.01	002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	561	91	92	92	100%	93	275	49%
1	02.09.01	001		Pengadaan Peralatan Kantor	tersedianya ruter wirewles		12 buah	20 buah	20 buah	100%	1 Buah	33	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

			V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	561	91	92	92	100%	93	274	49%
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terukurnya Capaian Kinerja SKPD		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
			2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan SKPD Semesteran		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
			3	Penyusunan Rencana strategis SKPD	Adanya Pedoman/ uan Pelaksanaan KegiAcatan 5 Tahunan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
			4	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Adanya Acuan dan Pedoman Untuk Pelaksanaan Kegiatan 1 Tahun		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
			5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan	Tersedianya Informasi Keuangan SKPD		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
1	02.09.01	15	001	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas lalu lintas yang memadai yang berwawasan lingkungan	442	72	73	73	100%	74	218	49%
1	02.09.01	15	001	Peningkatan Pengelolaan Terminal dan Parkir	Peningkatan pengelolaan dan pelayanan terminal parkir		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	
1	02.09.01	15	002	Penunjang Operasional Administrasi UPTD Terminal dan Parkir	Peningkatan pelayanan aparat terminal parkir		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1	02.09.01	15	003	Pengelolaan Gedung Parkir	Peningkatan pengelolaan Gedung Parkir		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	
1	02.09.01	15	005	Pengecatan marka jalan	Tersedianya Marka Petunjuk Jalan		1 peket	1 paket	1 Paket	100%	1 peket	3	
1	02.09.01	15	006	Pengadaan Warning Light	Jumlah warning Light yan terpasang		1 peket	1 paket	1 Paket	100%	1 peket	3	
1	02.09.01	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		441	71	72	72	100%	74	215	49%
1	02.09.01	16	001	Rehabilitasi / pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Terpelihara fasilitas LLAJ		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	
1	02.09.01	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		501	81	82	82	100%	83	217	49%
1	02.09.01	17	002	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	Terpilihnnya awak kendaraan umum teladan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3	
1	02.09.01	17	004	Up date data perbengkelan	Tersedianya data perbengkelan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3	
1	02.09.01	17	003	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Meningkatnya pengetahuan awak pengemudi		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3	
1	02.09.01	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		441	71	73	73	100%	74	215	49%
1	02.09.01	18	002	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Tersedianya ZOSS pada sekolah yang rawan kecelakaan		1 Peket	1 Peket	1 Peket	100%	1 Peket	3	
1	02.09.01	18	001	Kajian Manajemen persimpangan	Tersedianya Data Design Perbaikan Geometrik Simpang		1 Peket	1 Peket	1 Peket	100%	1 Peket	3	
1	02.09.01	21		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		441	71	72	72	100%	73	215	49%

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1	02.09.01	21	001	Lomba Tertib Lalu Lintas	Meraih penghargaan piala WTN		1 Peket	1 Peket	1 Peket	100%	1 Peket	3	
1	02.09.01	21	003	Penerangan / Penyuluhan Lalu Lintas	Meningkat nya kesadaran berlalu lintas		1 Peket	1 Peket	1 Peket	100%	1 Peket	3	
1	02.09.01	21	004	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas		1 Peket	1 Peket	1 Peket	100%	1 Peket	3	
1	02.09.01	21	002	Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas	Lancarnya lalu lintas kota		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36	
1	02.09.01	22		Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang laik beroperasi	501	81	82	82	100%	83	245	49%
1	02.09.01	22	01	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kalaiaikan kendaraan umum		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36	

Jika dilihat dari realisasi keuangan kegiatan tahun 2017 dimana dari 39 kegiatan tidak dapat terealisasi secara keseluruhan, pencairan dana program dan kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Realisasi 100 % | = 7 kegiatan |
| 2. Realisasi 85 - <100% (baik) | = 24 kegiatan |
| 3. Realisasi 70 - <85% | = 4 kegiatan |
| 4. Realisasi 0 - < 70% | = 4 kegiatan |

Anggaran yang tersedia dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun 2017 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sebesar Rp. 8.212.197.823.- dengan realisasi sebesar Rp. 6.906.734.857,- atau 84 %.

Pada tahun Program Kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2018 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 9. Penyediaan Makanan dan Minuman
 10. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi
 11. Penyediaan Jasa Pengawai Non PNS
 12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Peralatan Kantor
3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan , dengan kegiatan :
 1. Peningkatan pengelolaan terminal/ parkir

2. Pembangunan pos keamanan terminal
3. Penunjang operasional administrasi UPTD terminal dan parkir
4. Pengadaan marka jalan
5. Pengadaa warning light
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan :
 1. Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu lalu lintas.
5. Program Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan :
 1. Pemilihan awak kendaraan umum teladan
 2. Penyuluhan angkutan umum
 3. Up Date data perbengkelan
6. Program Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
 1. Kajian Manajemen persimpangan
 - 2.. Pembangunan zona selamat sekolah
7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan:
 1. Lomba tertib lalu lintas
 2. Pengendalian Lalu Lintas Kota Bukittinggi
 3. pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalulintas
 4. Penerangan penyuluhan lalu lintas
8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan kegiatan :
 1. Penunjang Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan stakeholder kota dalam bidang perhubungan. Guna mewujudkan tugas pokok dan fungsi dimaksud Dinas Perhubungan telah menyusun dan menetapkan berbagai tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan secara profesional dan komprehensif, sehingga pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dapat terealisasi dengan optimal.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat dan diukur dengan evaluasi kinerja terhadap 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas

2. Sasaran Meningkatnya Kinerja Angkutan Jalan

Adapun indikator Kinerja pelayanan SKPD untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah :

1. Persentase persentase Jalan Bebas Hambatan (Kemacetan)
2. Indek Kepuasan Masyarakat

Dari 2 indikator semua dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 masih sudah berjalan maksimal, dengan klasifikasi penilaian sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	100%	Sangat Baik	0
2	85% sd < 100%	Baik	2
3	70% sd < 85%	Sedang	0
4	0 sd < 70%	Kurang Baik	0

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK(PP- 6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Persentase peningkatan jalan bebas hambatan	Selesai di tahun 2016		100 %	90 %	80 %	70 %	80 %	88 %	90 %	90 %	
3.	Meningkatnya Kualitas angkutan jalan			70 %	75 %	80 %	85 %	75	81 %	85 %	90 %	

❖ SPM Dinas perhubungan telah selesai tahun 2016

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Analisa capaian / evaluasi kinerja terhadap 4 sasaran dengan 6 indikator sasaran adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI
1	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan (Kemacetan)	90%	88 %

Tercapainya indikator sasaran ini adalah :

- Tingkat kemacetan lalu lintas kota masih dapat dikendalikan dengan cara mengoptimalkan sarana pendukung lalu lintas yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
- Kemacetan hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu (liburan).
- Untuk batas maksimal kecepatan dalam kota diatur dengan rambu-rambu lalu lintas
- Dibutuhkan tenaga teknis untuk perbaikan traffic lights.

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik

Indikator dari Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah melihat sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan baik dari pelayanan Uji Ulang Kendaraan yang wajib uji pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor maupun pelayanan terhadap pengurus izin trayek (Kartu Pengawas) angkutan umum yang beroperasi dikota Bukittinggi.

Sejauh ini belum ada komplek dari masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan melalui kuisisioner survey yang diberikan kepada masyarakat atau pengemudi angkutan umum yang membutuhkan layanan Dinas perhubungan

2.3 ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.

Bertolak dari perkembangan perencanaan tahun sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi masih dihadapi dengan masalah dalam lingkup

tugas - tugas di bidang perhubungan, yang meliputi sistem lalu lintas dan angkutan jalan.

Sistem lalu lintas angkutan jalan terdiri dari sub sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain, yakni prasarana jalan, persimpangan dan terminal, serta sarana kendaraan untuk alat angkut dan manusia sebagai pemakai jalan. Bukittinggi sebagai kota tujuan wisata sangat membutuhkan sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi. Dalam hal ini rambu- rambu, marka, fasilitas pejalan kaki, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), pita penggaduh, pagar pengaman dan halte masih sangat dibutuhkan agar kelancaran lalu lintas dapat terjamin. Sementara itu, kebutuhan lahan parkir terutama pada saat-saat libur dan hari besar nasional tidak mencukupi, sehingga badan-badan jalan dipergunakan sebagai alternatif penempatan parkir kendaraan yang memasuki Kota Bukittinggi.

Pembangunan Gedung Parkir yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi masalah parkir dan kemacetan dalam kota Bukittinggi.

Jumlah kendaraan yang beroperasi dan berdomisili di dalam Kota Bukittinggi diperiksa dan diuji kelaikan jalannya pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bukittinggi yang telah diserahkan oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 01 Oktober 2005 kepada Kota Bukittinggi, yang saat ini masih memakai gedung dan peralatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Sementara Terminall tipe A Aur Kuning tererhitung Oktober 2016 diserahkan ke Pemerintahan Pusat.

Untuk memantau dan mengawasi kegiatan transportasi dalam Kota Bukittinggi ditugaskan personil - personil di lapangan terutama di titik - titik rawan seperti Pasar Atas, Pasar Bawah, Terminal Simpang Aur dan persimpangan jalan pada jam - jam sibuk yang sering mengalami kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas. Untuk itu lebih dibutuhkan pengetahuan dasar kelalulintasan bagi personil - personil Dinas Perhubungan

Kota Bukittinggi sehingga dalam melaksanakan tugas di lapangan, setiap sikap mental dan percaya diri dapat ditingkatkan.

i. Isu- Isu strategis Dinas Perhubungan

Dalam menjalankan tugas kedinasan isu-isu strategis baik dari dalam maupun luar Dinas Perhubungan antara lain :

Isu - isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan merupakan kondisi yang harus mendapat perhatian dalam proses perencanaan, mengingat dampaknya signifikan bagi capaian kinerja Dinas Perhubungan dan menentukan eksistensi organisasi pada masa yang akan datang. identifikasi terhadap isu - isu yang tepat dan bersifat sangat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara etis dapat dipertanggungjawabkan oleh Dinas Perhubungan yang mengemban amanat melaksanakannya. Isu strategis jika tidak diantisipasi dengan baik, akibatnya akan sangat merugikan bagi Dinas Perhubungan. Berdasarkan analisis faktor-faktor internal organisasi dan faktor eksternal, berupa kondisi yang berimplikasi timbulnya peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan di masa lima tahun yang akan datang. Dari aspek kajian tersebut dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Perhubungan, Beberapa isu strategis yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, regional/lokal dan lingkungan lainnya adalah :

1. Isu tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Tingginya angka kecelakaan di jalan raya menyebabkan tingginya angka kematian. Dibeberapa wilayah Kota Bukittinggi terdapat zona black spot (rawan kecelakaan), yang masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan di daerah jalur lintas kota Bukittinggi dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Terkait tingginya angka kecelakaan, tentu saja hal ini erat hubungannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat akan tertib lalulintas dan juga kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, disamping perlu juga dilakukan penerangan dan sosialisasi terkait keselamatan lalu lintas. Disamping itu perlu juga dilakukan penjagaan kawasan- kawasan rawan kecelakaan dengan menmpatkan petugas dari Dinas Perhubungan.

2. Isu tingginya tingkat Kemacetan Lalu Lintas.

Lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, oleh karena itu lalu lintas merupakan salah satu masalah penting. Apabila arus lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan-gangguan ini akan berdampak negatif pada masyarakat. Lalu lintas merupakan suatu masalah sulit yang harus dipecahkan bersama dan sangat penting untuk segera diselesaikan. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka semua kerugian yang timbul akibat masalah ini akan ditanggung oleh masyarakat itu sendiri, dan apabila masalah ini dapat terpecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya.

Sebagai salah satu negara sedang berkembang, Indonesia seperti negara sedang berkembang lainnya mengalami permasalahan-permasalahan lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara maju, mulai dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, kesenjangan sosial, hingga kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan itu sendiri. Kemacetan atau kongesti adalah salah satu diantaranya.

3. Isu Belum terpenuhinya sarana dan prasarana LLAJ

Sebagaimana disampaikan pada point sebelumnya, bahwa di Kota Bukittinggi masih tinggi angka kecelakaan lalu lintas yang salah satunya disebabkan kurangnya sarana fasilitas jalan. Oleh sebab itu, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 ayat 1 berbunyi setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa : a.Rambu Lalu Lintas, b.Marka Jalan, c.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, d.Alat Penerangan Jalan, e.Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, f.Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki,dan Penyandang Cacat, h.Fasilitas pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka diperlukan pemenuhan terhadap fasilitas jalan tersebut.

Demikian juga halnya dengan perparkiran. Perparkiran bertujuan agar pergerakan lalulintas dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib sehingga pengaturan perparkiran juga menjadi prioritas untuk dibenahi.

4. Isu Kurangnya kualitas angkutan jalan

Sebagaimana telah digambarkan bahwa pada Kota Bukittinggi, dari 24 jalur trayek angkutan kota belum semua dilalui angkutan kota. Disamping itu masih terdapat pangkalan-pangkalan angkutan di luar terminal.

Disisi lain juga dalam menciptakan angkutan yang berkualitas diperlukan uji laik kendaraan dimana saat ini masih ada kendaraan yang tidak melakukan uji laik kendaraan serta permasalahan sarana dan prasarana penunjang itu sendiri yang masih dirasa kurang memadai. Kedepan diharapkan disamping setiap kendaraan angkutan umum mempunyai izin trayek serta lulus uji laik kendaraan.

5. Isu rendahnya kualitas pelayanan Publik

Baik buruknya pelayanan tergantung kepada kualitas sumber daya manusia (SDM) pemberi pelayanan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik sangat mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas sebagai objek atau penikmat dari pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Dalam hal ini, kedepannya akan dilakukan pengukuran dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan sebuah alat ukur untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kehebatan ataupun justru kelemahan-kelemahan pada unit-unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan publik.

1.4 Peluang Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Transportasi mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Transportasi merupakan suatu system yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia, membentuk jaringan prasarana dan pelayanan serta urat nadi terjadinya proses ekonomi. Hal ini berarti bahwa kelemahan sektor transportasi akan menghambat laju pertumbuhan sektor lainnya. Permasalahan transportasi selalu terjadi hampir diseluruh kota-kota besar di dunia, dan bahkan sudah dalam keadaan yang sangat kritis. Penyebabnya antara lain: mulai terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, urbanisasi yang cepat, tingkat kedisiplinan lalu lintas yang rendah, semakin jauh pergerakan manusia setiap harinya, dan mungkin juga system perencanaan transportasi yang kurang baik. Akibatnya kemacetan, tundaan, kecelakaan, gangguan kesehatan, dan permasalahan lingkungan yang tidak dapat dihindari lagi.

Demikian juga halnya dengan Kota Bukittinggi, dalam kenyataannya masih terjadi permasalahan transportasi. Kecelakaan jalan, kemacetan dan gangguan lalu lintas merupakan contoh dari permasalahan yang terjadi saat ini.

Sistem lalu lintas angkutan jalan terdiri dari sub sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain, yakni prasarana jalan, persimpangan dan terminal, serta sarana kendaraan untuk alat angkut dan manusia sebagai pemakai jalan. Kota Bukittinggi sebagai kota tujuan wisata sangat membutuhkan sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi. Dalam hal ini perambuan, marka, fasilitas pejalan kaki, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), pita penggaduh, pagar pengaman dan halte masih sangat dibutuhkan agar kelancaran lalu lintas dapat terjamin. Sementara itu, kebutuhan lahan parkir terutama pada saat – saat libur dan hari besar nasional tidak mencukupi, sehingga badan – badan jalan dipergunakan sebagai alternatif penempatan parkir kendaraan yang memasuki Kota Bukittinggi.

Dengan wilayah seluas $\pm 25 \text{ Km}^2$, dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan telah dibentuk/ditetapkan trayek angkutan kota sebanyak 24 trayek dengan 539 unit kendaraan yang melayani trayek dalam Kota Bukittinggi. Untuk angkutan pedesaan yang memasuki Kota Bukittinggi yang diberikan dispensasi perpanjangan izin karena masyarakat Agam Timur pada umumnya beraktifitas di Kota Bukittinggi dan pertumbuhan angkutan pedesaan ini sangat sulit dikendalikan. Sedangkan untuk kendaraan angkutan barang Bukittinggi belum mempunyai terminal angkutan barang sampai saat ini, angkutan barang memanfaatkan Jalan M. Syafei dan sepanjang jalan By Pass untuk melakukan aktivitas bongkar muat.

Jumlah kendaraan yang beroperasi dan berdomisili di dalam Kota Bukittinggi diperiksa dan diuji kelaikan jalannya pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bukittinggi yang telah diserahkan oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 01 Oktober 2005 kepada Kota Bukittinggi, yang saat ini masih memakai gedung dan peralatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Pelayanan transportasi Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) serta angkutan kota difasilitasi oleh Terminal Penumpang Tipe A Simpang Aur yang mulai 1 Oktober 2016 pengelolaannya diambil alih kembali oleh Pemerintah Pusat. Bukittinggi hanya

mengelola terminal tipe C (Terminal Wowo) untuk menampung angkutan kota dan angkutan pedesaan yang berasal dari arah utara.

Untuk memantau dan mengawasi kegiatan transportasi dalam Kota Bukittinggi ditugaskan personil – personil di lapangan terutama di titik – titik rawan seperti Pasar Atas, Pasar Bawah, Terminal Simpang Aur dan persimpangan jalan pada jam – jam sibuk yang sering mengalami kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas. Untuk itu lebih dibutuhkan pengetahuan dasar kelalulintasan bagi personil – personil Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sehingga dalam melaksanakan tugas di lapangan, setiap sikap mental dan percaya diri dapat ditingkatkan.

Permasalahan transportasi di Kota Bukittinggi menjadi salah satu masalah utama yang menuntut perhatian untuk segera ditangani. Sebagai kota tujuan wisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa maka Pemerintah Kota Bukittinggi menyadari sepenuhnya bahwa perkembangan daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur wilayah. Berbagai langkah dan upaya ditempuh untuk meningkatkan infrastruktur wilayah, terutama untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Melalui Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang melingkupi tugas – tugas di bidang perhubungan yang meliputi sistem lalu lintas dan angkutan jalan sebagai penunjang potensi unggulan kota maka pengembangan sektor perhubungan diarahkan pada peningkatan pelayanan lalu lintas untuk mobilitas manusia, barang dan jasa baik dalam daerah maupun luar daerah.

Dengan melihat perkembangan transportasi Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan kajian untuk mengidentifikasi permasalahan terkait transportasi. Melalui analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dicoba untuk mengidentifikasi factor internal dan factor eksternal sehingga menggambarkan secara jelas keterkaitan antara kondisi internal dan eksternal yang ditunjukkan dalam empat hubungan, yaitu:

1. memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang,
2. memanfaatkan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman,
3. menghilangkan kelemahan untuk meraih peluang,
4. menghilangkan kelemahan untuk mengantisipasi ancaman.

2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Program dan kegiatan yang terdapat dalam Rancangan awal RKPD tahun 2016 pada umumnya telah sesuai dengan RKA 2016. Disamping program dan kegiatan rutin yang ada pada setiap SKPD, program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Program yang dilaksanakan berkesinambungan dengan program pada tahun 2018 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2016- 2021. Capaian kinerja pada tahun 2018 belum tercapai dengan maksimal, sehingga masih dibutuhkan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sama pada tahun 2018. Sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan diantaranya pengadaan sarana dan prasarana gedung parkir. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tebel. T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATA N PENTIN G	
NO	PROGRAM/KEGIATA N	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARG ET CAPAI AN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11	12
I - - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Bukittinggi	Materai 3000	250	buah	3.350.000	I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
	Penyediaan jasa surat menyurat				-		Penyediaan jasa surat menyurat	Bukittinggi	Materai 3000	250 buah	3.350.000		
			Materai 6000	200 buah					Materai 6000	200 buah			
		Pengadaan buku cek dan materai benda Pos lainnya dan pengiriman surat	10 buah				Pengadaan buku cek dan materai benda Pos lainnya dan pengiriman surat	10 buah					
			1 ls							1 ls			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bukittinggi	jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	bulan	101.200.000	-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bukittinggi	jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	101.200.000	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bukittinggi	Servis, suku cadang, bbm, pajak	6 unit roda 4, 12 roda 2	150.560.000	-	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bukittinggi	Servis, suku cadang, bbm, pajak	6 unit roda 4, 12 roda 2	150.560.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bukittinggi	Alat/ bahan dan jasa kebersihan	12 bulan	154.449.600	-	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bukittinggi	Alat/ bahan dan jasa kebersihan	12 bulan	154.449.600	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Bukittinggi	Servis komputer, printer, laptop, HT dan mesin tik	12 bulan	15.000.000	-	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Bukittinggi	Servis komputer, printer, laptop, HT dan mesin tik	12 bulan	15.000.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	alat tulis kantor	12 bulan	33.219.300	-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	alat tulis kantor	12 bulan	33.219.300	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bukittinggi	cetakan dan penggandaan	12 bulan	25.150.000	-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bukittinggi	cetakan dan penggandaan	12 bulan	25.150.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bukittinggi	Alat listrik dan elektronik	12 bulan	5.000.000	-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bukittinggi	Alat listrik dan elektronik	12 bulan	5.000.000	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

	Penyediaan makanan dan minuman	Bukittinggi	makan dan minum harian pegawai, lembur dan rapat	1	ls	7.3000.000	-	Penyediaan makanan dan minuman	Bukittinggi	makan dan minum harian pegawai, lembur dan rapat	1	ls	7.300.000	
	Rapat-rapat kordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi luar kota Bukittinggi luar kota Bukittinggi	Bukittinggi	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1	tahun	300.000.000		Rapat-rapat kordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi luar kota Bukittinggi luar kota Bukittinggi	Bukittinggi	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1	tahun	300.000.000	
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	honor pekerja kontrak dan asuransi	12	bulan	421.200.000		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	honor pekerja kontrak dan asuransi	12	bulan	421.200.000	
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	Honor PPHP, PPK, PTK, Pejabat pengadaan	12	bulan	40.507.000	-	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	Honor PPHP, PPK, PTK, Pejabat pengadaan	12	bulan	40.507.000	
	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara	Bukittinggi					-	Pelaksanaan Layanan Pengadaan	Bukittinggi					

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

	Elektronik						Secara Elektronik						
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				1.300.000.000		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					1.300.000.000	
-	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi			50.000.000	-	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi				50.000.000	
-	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	Laptop	1 unit	65.000.000	-	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	Laptop	1 unit		65.000.000	
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dishub	Bukittinggi	Perencanaan gedung kantor		0	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dishub	Bukittinggi	Perencanaan gedung kantor			0	
-	Pengadaan Mebeleur				30.000.000							30.000.000	
-	Pembangunan DED Gedung Kantor				500.000.000							500.000.000	Prioritas
-	Pengadaan Gedung baru Kantor				0							0	
3	PROGRAM PENINGKATAN	100 %			105.000.000	3	PROGRAM PENINGKATAN						

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

4	DISIPLIN APARATUR						DISIPLIN APARATUR						
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Bukittinggi	Pakaian dinas, sepatu pdh dan pakaian olah ra	105	105.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Bukittinggi	Pakaian dinas, sepatu pdh dan pakaian olah raga			105.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur		Terdidik dan terlatihnya PNS		100.000.000								
	Pendidikan dan pelatihan formal			3 orang	100.000.000								
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN, CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN					4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN, CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN						
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bukittinggi	Lakip				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bukittinggi	Lakip			0	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Bukittinggi	Meningkatnya pelaporan kinerja				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Bukittinggi	Meningkatnya pelaporan kinerja			0	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

			semesteran					semesteran					
	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Bukittinggi	Renja				Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Bukittinggi	renja			0	
	Penyusunan renstra SKPD	Bukittinggi					Penyusunan renstra SKPD	Bukittinggi					
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bukittinggi	Tersediannya informasi keuangan tahunan SKPD				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bukittinggi	Tersediannya informasi keuangan tahunan SKPD			0	
5	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN					5	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN						
	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	Bukittinggi	Peningkatan pelayanan dan pengawasan terminal parkir	1 tahun	2.970.000.000		Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	Bukittinggi	Peningkatan pelayanan dan pengawasan terminal parkir	1 tahun		2.970.000.000	
	Penunjang Operasional dan	Bukittinggi	Peningkatan pelayanan aparatur	1 tahun	252.996.185		Penunjang Operasional dan Administrasi	Bukittinggi	Peningkatan pelayanan aparatur	1 tahun		252.996.185	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

	Administrasi Terminal dan Parkir		terminal dan paker				Terminal dan Parkir		terminal dan paker				
	Pengelolaan Gedung Parkir	Bukittinggi	Pelayanan Parkir		516.140.000		Pengelolaan Gedung Parkir	Bukittinggi	Pelayanan Parkir			516.140.000	
	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Bukittinggi	Persentase pemenuhan cermin tikung				Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Bukittinggi	Persentase pemenuhan cermin tikung			0	
	Pengadaan Road Barrier	Bukittinggi	Persentase pemenuhan road barrier jalan kota				Pengadaan Road Barrier	Bukittinggi	Persentase pemenuhan road barrier jalan kota			0	
	Pengadaan Rubber Speed Humb/Pita Kejut/Pita Penggaduh	Bukittinggi	Persentase pemenuhan pita penggaduh		200.000.000		Pengadaan Rubber Speed Humb/Pita Kejut/Pita Penggaduh	Bukittinggi	Persentase pemenuhan pita penggaduh			200.000.000	Musren bang
	Pengadaan Traffic Light	Bukittinggi	Persentase penurunan konflik di persimpangan		1.500.000.000		Pengadaan Traffic Light	Bukittinggi	Persentase penurunan konflik di persimpangan			1.500.000.000	
	Pengecatan Marka Jalan	Bukittinggi	Persentase pemenuhan marka jalan	1 paket	1.300.000.000		Pngecatan Marka Jalan	Bukittinggi	Persentase pemenuhan marka jalan	1 paket		1.300.000	
	Pengadaan warning Light	Bukittinggi	Persentase penurunan	1 paket	200.000.000		Pengadaan warning Light	Bukittinggi	Persentase penurunan	1 paket		200.000.000	Musren bang

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

6			konflik di persimpangan			6			konflik di persimpangan				
	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ						PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ						
	Pengadaan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ) (DAK Tahun 2016)	Bukittinggi					Pengadaan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ) (DAK Tahun 2016)	Bukittinggi				0	
	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas	Bukittinggi	Rambu lalu lintas yang layak	1 tahun	700.000.000		Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas	Bukittinggi	Rambu lalu lintas yang layak	1 tahun		700.000.000	Pokir/Musrenbang
	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015)	Bukittinggi	Persentase pemenuhan marka jalan kota		700.000.000		DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015)	Bukittinggi	Persentase pemenuhan marka jalan kota			0	
	Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS (Area Traffic Control System)	Bukittinggi	Persentase penurunan konflik di persimpangan				Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS (Area Traffic Control System)	Bukittinggi	Persentase penurunan konflik di persimpangan			0	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN					7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN						
	Pemilihan awak kendaraan umum Teladan	Bukittinggi	Meningkatnya Pelayanan awak kendaraan umum	30 orang	52.614.000		Pemilihan awak kendaraan umum Teladan	Bukittinggi	Meningkatnya Pelayanan awak kendaraan umum	30 orang	52.614.000		
	Penyuluhan Angkutan Umum	Bukittinggi	Terbinanya pengemudi angkutan umum/angkutan kota				Penyuluhan Angkutan Umum	Bukittinggi	Terbinanya pengemudi angkutan umum/angkutan kota				
	Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Bukittinggi	Persentase angkutan kota yang beroperasi sesuai dengan PERDA No. 6 Tahun 2016		13.745.000		Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Bukittinggi	Persentase angkutan kota yang beroperasi sesuai dengan PERDA No. 6 Tahun 2016			13.745.000	
	Pendataan angkutan barang (bermotor dan tidak bermotor)	Bukittinggi					Pendataan angkutan barang (bermotor dan tidak bermotor)	Bukittinggi					

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

	Pendataan perbengkelan kota Bukittinggi	Bukittinggi						Pendataan perbengkelan kota Bukittinggi	Bukittinggi					
	Pengadaan Stiker dan Papan Trayek Angkutan	Bukittinggi	Papan trayek	1078		40.000.000		Pengadaan Stiker dan Papan Trayek Angkutan	Bukittinggi	Papan trayek	1078		40.000.000	
	Evaluasi Kinerja Angkutan Umum	Bukittinggi	Persentase kendaraan angkutan umum yang beroperasi tidak melebihi daya angkutan			80.070.000		Evaluasi Kinerja Angkutan Umum	Bukittinggi	Persentase kendaraan angkutan umum yang beroperasi tidak melebihi daya angkutan			80.070.000	
	Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota	Bukittinggi	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan trayek angkutan kota			380.000.000		Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota	Bukittinggi	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan trayek angkutan kota			380.000.000	
	Rancangan Induk Jaringan Lalu Lintas Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Persentase kendaraan angkutan kota yang beroperasi sesuai					Rancangan Induk Jaringan Lalu Lintas Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Persentase kendaraan angkutan kota yang beroperasi sesuai				

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

			dengan lintasan trayek dalam kota						dengan lintasan trayek dalam kota				
	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum	Bukittinggi	Persentase kendaraan angkutan kota beroperasi sesuai dengan PERDA No.6 Tahun 2016			9.118.000		Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum	Bukittinggi	Persentase kendaraan angkutan kota beroperasi sesuai dengan PERDA No.6 Tahun 2016			9.118.000
	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Bukittinggi	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan tidak bermotor	30	orang	9.715.000		Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Bukittinggi	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan tidak bermotor	30	orang	9.715.000
	Pembuatan Plat Kendaraan Non Bermotor/ Bendi							Pembuatan Plat Kendaraan Non Bermotor/ Bendi					
8	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN						8	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN					

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

	PRASARANA PERHUBUNGAN							PRASARANA PERHUBUNGAN						
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Bukittinggi	Persentase pemenuhan zona selamat sekolah	1	paket	200.000.000		Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Bukittinggi	Persentase pemenuhan zona selamat sekolah	1	paket	200.000.000	Musren bang
	Kajian Manajemen persimpangan	Bukittinggi		1	Doku men	0		Kajian Manajemen persimpangan	Bukittinggi		1	Doku men	0	
								Pembangunan Halte	Bukittinggi	Jumlah halte yang dibangun	1	Paket	110.000.000	Pokir/M usrenba ng
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS						9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS						
	Lomba Tertib Lalu Lintas	Bukittinggi	WTN	1	Keg	59.529.870		Lomba Tertib Lalu Lintas	Bukittinggi	WTN	1	Keg	59.529.870	
	Penerangan/ Penyulunan lalu lintas	Bukittinggi	Meningkatnya kesadaran berlalu lintas	12	Sekolah	16.432.600		Penerangan/ Penyulunan lalu lintas	Bukittinggi	Meningkatnya kesadaran berlalu lintas	12	Sekolah	16.432.600	
	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Bukittinggi	Terpilihnya pelajar pelopor Keselamatan lalu	15	sekolah	53.466.000		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Bukittinggi	Terpilihnya pelajar pelopor Keselamatan lalu Lintas	15	sekolah	53.466.000	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

			Lintas											
	Pengendalian Lalu Lintas Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Terkendalin ya lalu lintas	1	tahun	1.892.788.930		Pengendalian Lalu Lintas Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Terkendalin ya lalu lintas	1	tahun	1.892.788.930	
10	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR						10	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR						
	Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	Bukittinggi	Meningkatnya kelaikan kendaraan umum	12	bulan	676.390.000		Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	Bukittinggi	Meningkatnya kelaikan kendaraan umum	12	bulan	676.390.000	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada penyusunan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 salah satunya melalui tahapan pelaksanaan Musrenbang, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bukittinggi juga ikut serta dalam mensukseskan pelaksanaan musrenbang tersebut sejak dari Musrenbang kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga perencanaan bottom up tersebut dapat terlaksana dengan baik. Beberapa kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang

Kegiatan dan lokasi yang diusulkan melalui Musrenbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang telah direncanakan melalui Rencana Strategis Dinas perhubungan tahun 2016- 2021, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU PEPENTINGAN TAHUN 2019 DINAS PERHUBUNGAN

NO	Program/Kegiatan	Lokasi/ Kec	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
1	Pemasangan Rubber Speed Humm	MKS	Lalu lintas tertip dan lancar	15 bh	
2	Zebra cross	MKS	Lalu lintas tertip dan lancar	41	
3	Cermin Tikung	MKS	Lalu lintas tertip dan lancar	4	
4	Warning Light	Guguk Panjang	Lalu lintas tertip dan lancar	1	
5	Pemasangan Rubber Speed Humm	Guguk Panjang	Lalu lintas tertip dan lancar	6	
6	Pembuatan	Guguk	Lalu lintas	1	

	Ampang/Portal	Panjang	tertip dan lancar		
7	Pembuatan Halte	Guguk Panjang	Lalu lintas tertip dan lancar	2	
8	Jl. Yos Sudarso dari tanjakan dekat wisma merdeka sampai depan Bangk Nagari cabang Bukittinggi satu jalur saja dan jalan Teuku Umar juga satu jalur tanjakan saja	Guguk Panjang	Lalu lintas tertip dan lancar	1	
9	Pemasangan Rubber Speed Humm	ABTB	Lalu lintas tertip dan lancar	20	
10	Pemasangan loning/pagar pembatas bahu jalan	ABTB	Lalu lintas tertip dan lancar	1	
11	Pengadaan Rambu-rambu Zona Aman/Zona Anak Sekolah	ABTB	Lalu lintas tertib dan lancar	3	

Usulan melalui Pokok-pokok Pikiran DPRD

NO	NAMA ANGGATA DEWAN	USULAN KEG.	LOKASI	JUMLAH	
1.	UNEVA HARIANTO, SH	Rambu-rambu untuk kawasan wisata jln. Binuang ngarai sianok	Kayu Kubu	1 paket	
2	RUSDI NURMAN	Pemb.Halte	Pulai anak air	1 paket	

PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA :

Pembuatan DED Kantor Dinas Perhubungan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan nasional bidang transportasi merupakan tulang punggung penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (feeder). Untuk Kota Bukittinggi dengan spesifikasi daerah perbukitan dan tidak mempunyai angkutan udara serta perairan, masalah transportasi yang dihadapi adalah bidang transportasi perkotaan dan bidang angkutan jalan.

Arah pengembangan transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara system angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Sementara untuk angkutan jalan diperlukan pengembangan jaringan transportasi jalan primer untuk meningkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas.

Adapun kebijakan Infrastruktur transportasi darat di tingkat nasional adalah :

1. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasi darat. Mengupayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi darat.
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundang- undangan, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi darat.
4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan

transportasi darat yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

Dengan adanya arah kebijakan infrastruktur transportasi darat tersebut antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah Kab/Kota mempunyai batasan kewenangan penyelenggaraan, dan yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota sebagai berikut :

1. Pembinaan Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
2. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
Penetapan Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan
3. Pengujian Kendaraan bermotor
Pengujian berkala kendaraan bermotor
4. Penyediaan Angkutan Umum
Kewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam wilayah kota.

Permasalahan yang berlaku umum dalam bidang transportasi darat dan sesuai dengan Penjelasan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah : *lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.*

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sesuai dengan visi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yaitu : *"Terwujudnya Transportasi di Kota bukittinggi yang aman selamat tertib dan lancar"*, telah dijabarkan dalam misi " Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas dijalan "

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Tujuan pembangunan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi adalah sbb : “ *Terwujudnya sistim transportasi yang berkualitas* “

3.2.1. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan adalah :

1. Meningkatkan keselamatan keselamatan dan kelancaran berlalulintas
2. Meningkatnya Kualitas angkutan jalan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
I.	Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.	Penyediaan jasa surat menyurat
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.	Penyediaan makanan dan minuman
11.	Rapat-rapat kordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi
12.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
13.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
15.	Pengadaan peralatan kantor

16.	Pengadaan mebeleur
17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dishub
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Pendidikan dan pelatihan formal
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20.	Penyusunan laporan keuangan semesteran
22.	Penyusunan DPA dan DPPA SKPD
23.	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD
24.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
V.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
25.	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir
26.	Penunjang Operasional dan Administrasi Terminal dan Parkir
27.	Pengelolaan gedung parkir
28.	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
29.	Pengadaan Road Barrier
30.	Pengadaan Rubber Speed Humb / Pita Kejut
31.	Pengadaan Traffic Light
VI.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
31.	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas
32.	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015
33.	Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS (Area Traffic Control System)
VII.	Program peningkatan pelayanan angkutan
34.	Pemilihan awak kendaraan umum Teladan
35.	Penyuluhan Bagi Para Supir / Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
36.	Pengadaan Stiker dan Papan Trayek Angkutan
37.	Evaluasi Kinerja angkutan Umum
38.	Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota
39.	Rancangan Induk Jaringan Lalu Lintas Kota Bukittinggi
40.	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum
41.	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor

42	Up Date Data Perbengkelan
VIII	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
43.	Pembangunan Zona Selamat Sekolah
44	Kajian Manajemen persimpangan
IX.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
46.	Lomba Tertib Lalu Lintas
47.	Penerangan/Penyuluhan Lalu Lintas
48.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
49.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
X.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
50.	Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor

- 3.4. Jumlah Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam Renja 2019 terdiri dari 11 program dan 41 kegiatan semua kegiatan yang diusulkan merupakan terdiri dari Prioritas Walikota, usulan musrenbang, dan usulan Pokir DPRD dan Renja SKPD dan semua kegiatan telah diakomodi para RKPD 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA BUKITTINGGI

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Form 3.3

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Rencana Tahun 2020 (n+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH SELURUHNYA					13.729.941.485				23.189.328.900
A	NON URUSAN				3.406.935.900				11.809.328.900
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran			1.256.935.900				1.271.328.900
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Pelaksanaan Surat Menyurat	Dishub	500 bh materai 600, 100 bh maretai 3000, 10 bk cek	3.350.000	APBD		12 Bulan	3.350.000
2	Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan Listrik	Rekening Telepon, Air dan ListrikTerbayar (36 Rekening)	Dishub	60 bh rekening	101.200.000	APBD		12 Bulan	101.200.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	Dishub	6 kend.roda 4, 15 kend 2	150.560.000	APBD		12 Bulan	150.560.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kantor Yang Bersih	Dishub	10 item bhn pembersih, 1 paket CS dan th ret sampah	154.449.600	APBD		12 Bulan	154.449.600
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	Dishub	10 Komp, 13 laptop, 15 printer, 26 Ht, 2 mesin tik	15.000.000	APBD		12 Bulan	15.000.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	Dishub	50 item	33.219.300	APBD		1 Paket	33.219.300
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	Dishub	17 cetakan, Ls Foco dan jilid	25.150.000	APBD		1 Paket	25.150.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik yang dibeli	Dishub	8 item	5.000.000	APBD		1 Paket	5.500.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan	Dishub	425 porsi	7.300.000	APBD		12 Bulan	7.900.000
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat Koordinasi Yang Diikuti	Dishub	12 Bulan	300.000.000	APBD		12 Bulan	300.000.000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Dishub	12 orang	421.200.000	APBD		12 Bulan	450.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Lancarnya Pekerjaan Administrasi	Dishub	12 Bulan	40.507.000	APBD		12 Bulan	25.000.000
13	Penyediaan jasa keamanan	Tersedianya jasa keamanan	Dishub	12 Bulan	0	APBD		12 Bulan	0
14	Pendataan dan penataan arsip	Menyelamatkan dan melestarikan arsip	Dishub	1 keg	0	APBD		1 Kegiatan	0
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur			1.945.000.000				10.285.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Dishub	1 unit	1.300.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000
2	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan kantor	Dishub	10 haldy taki, Anroid sms getaway, mesin absensi dan 2 bh laptop	65.000.000	APBD		1 Paket	60.000.000
3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Dishub	27 unit	50.000.000	APBD		1 Paket	60.000.000
4	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Dishub	2 lemari ,2 kursi tamu	30.000.000	APBD		1 Paket	65.000.000
5	Pembangunan DED Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	Dishub	1 Paket	500.000.000	APBD		1 Paket	0
6	Pemeliharaan Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terciptanya Gedung Kantor Yang Layak dan Nyaman	Dishub	1 Paket	0	APBD		1 Paket	0

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

7	Pengadaan gedung baru kantor	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor	Dishub	1 Paket	0			1 Paket	10.000.000.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai			105.000.000				125.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terciptanya Aparatur Yang Berwibawa	Dishub	100 orang	105.000.000	APBD		1 Paket	125.000.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100.000.000				120.000.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terdidiknya dan Terlatihnya Aparatur Sesuai Dengan Kualifikasi Teknis	Dishub	3 orang	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	120.000.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan			0				8.000.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terukurnya Capaian Kinerja SKPD	Dishub	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	2.000.000
2	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan	Dishub	2 Laporan	0	APBD		2 Laporan	1.500.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

	Semesteran	SKPD Semesteran							
3	Penyusunan Rencana strategis SKPD	Adanya Pedoman/uan Pelaksanaan KegiAcatan 5 Tahunan	Dishub	1 Dokumen	0	APBD		-	0
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Adanya Acuan dan Pedoman Untuk Pelaksanaan Kegiatan 1 Tahun	Dishub	2 Dokumen	0	APBD		2 Dokumen	2.000.000
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan	Tersedianya Informasi Keuangan SKPD	Dishub	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	2.500.000
B	URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN				10.323.005.585				11.380.000.000
VI	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Yang Memadai			5.839.136.185				7.150.000.000
1	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	Jumlah Jumlah PNS/Non PNS dan Jukir	Dishub	117 org	2.970.000.000	APBD	Sesuai cascading	12 Bulan	3.500.000.000
2	Penunjang Operasional Administrasi UPTD Terminal dan Parkir	Operasional terminal dan parkir 12 bulan	Dishub	12 Bulan	252.996.185	APBD	Sesuai cascading	12 Bulan	900.000.000
3	Pengelolaan Gedung parkir	2 buah gedung parkir	Dishub	2 Gedung	516.140.000	APBD	Sesuai cascading	12 Bulan	1.100.000.000
4	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Petunjuk dan Larangan	Dishub	1 Paket	0	APBD		1 Paket	0
5	Pengecatan Marka Jalan	Tersedianya Marka Petunjuk Jalan	Dishub	1 Paket	0	APBD		1 Paket	100.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

6	Pengadaan Road Barrier	Jumlah Road Barrier	Dishub	1 Paket	0	APBD		1 Paket	300.000.000
7	Pengadaan Rubber Speed Humb	Jumlah Rubber Speed Humb dipasang	Dishub	1 Paket	200.000.000	APBD	Usulan Musrenbang kelurahan	1 Paket	250.000.000
8	Pengadaan dan Penggantian RPPJ	Tersedianya RPPJ	Dishub	1 Paket	0	APBD		-	250.000.000
9	Pengadaan Traffic Cone	Tersedianya Alat Pengarah dan Pengatur Lalu Lintas	Dishub	1 Paket	0	APBD		-	250.000.000
11	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	Tersedianya Rel Pembatas Bahu Jalan Pada Bahu Jalan Yang Kritis	Dishub	1 Paket	0	APBD		-	250.000.000
12	Pengadaan Warning Light	Jumlah warning Light yang terpasang	Dishub	1 Paket	200.000.000	APBD	Usulan Musrenbang kelurahan	-	250.000.000
13	Pengadaan Traffic Light	Jumlah Traffick yang terpasang	Dishub	1 Paket	1.500.000.000	APBD	Sesuai cascading	1 Paket	0
14	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung	Jumlah cermin tikung yang tepasang	Dishub	1 Paket	200.000.000		Usulan Musrenbang kelurahan		250.000.000
VII	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Prasarana dan fasilitas perhubungan dapat berfungsi dengan baik			700.000.000				800.000.000
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu	Jumlah rambu yang terpelihara	Dishub	12 Bulan	700.000.000	APBD	Usulan Musrenba	12 Bulan	800.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

	Lintas						ng kelurahan		
2	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015)		Dishub		0				0
3	Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS (Area Traffic Control System)		Dishub		0				0
VIII	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan			500.000.000				300.000.000
1	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang	Tersedianya Jembatan Penyeberangan Orang Untuk Mengurangi Konflik Lalu Lintas	Dishub	1 Paket	0	APBD		1 Paket	0
2	Penyusunan Kajian Jaringan Induk lalulintas kota Kota	Dokumen data jaringan jalan	Dishub	1 Dokumen	300.000.000	APBD	Sesuai cascading	-	0
3	Penyusunan Ranperda Lalu Lintas Darat	Tersedianya Ranperda Lalu Lintas	Dishub	1 Dokumen	0	APBD		-	0
4	Pembangunan dan Pengembangan ATCS	Terciptanya Pengaturan Simpang Bersinyal Yang Terintegrasi Dengan System Smart City	Dishub	1 Paket	0	APBD		-	0

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

5	Kajian Geometrik Persimpangan	Tersedianya Data Design Perbaikan Geometrik Simpang	Dishub	-	0	APBD		1 Dokumen	0
6	Pembangunan dan Pengembangan Pedestrian	Tersedianya Fasilitas Bagi Pejalan Kaki	Dishub	1 Paket	0	APBD		-	0
7	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Jumlah Zoss yang terpasang	Dishub	1 Paket	200.000.000	APBD	Usulan Musrenbang kelurahan	1 Paket	300.000.000
8	Pembangunan Halte	Tersedianya Halte	Dishub	1 Paket	0	APBD		1 Paket	0
IX	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan jasa angkutan umum			585.262.000				525.000.000
1	Evaluasi Kinerja Angkutan Umum	Dokumen Tingkat kinerja angkutan umum dan faktor muat	Dishub	1 Dokumen	80.070.000	APBD	Sesuai cascading	4 Dokumen	160.000.000
2	Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota	Dokumen Pelayanan angkutan umum (jaringan trayek)	Dishub	1 Dokumen	380.000.000	APBD	Sesuai cascading	-	0
4	Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Jumlah juru mudi	Dishub	30 Orang	13.745.000	APBD	Sesuai cascading	30 Orang	25.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

5	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum	Laporan Kegiatan permasalahan angkutan umum	Dishub	12 Kali	9.118.000	APBD	Sesuai cascading	12 Kali	10.000.000
6	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	Jumlah awak angkutan umum teladan yang dipilih	Dishub	3 Orang	52.614.000	APBD	Sesuai cascading	3 Orang	85.000.000
7	Pengadaan Stiker Papan Trayek Angkutan	Jumlah papan stiker yang dicetak	Dishub	1 Paket	40.000.000	APBD	Sesuai cascading	1 Paket	30.000.000
8	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Jumlah pengemudi angkutan umum yang dibina	Dishub	30 Orang	9.715.000	APBD	Sesuai cascading	30 Orang	20.000.000
9	Up date data perbengkelan	Jumlah bengkel yang didata	Dishub	dokumen	0				20.000.000
10	Pemeriksaan lapangan dan pemosisan kartu pengawas angkutan kota	Lancarnya pelayanan kepada masyarakat	Dishub	539 izin	0	APBD			175.000.000
X	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya persentase ketertiban berlalu lintas			2.022.217.400				2.105.000.000
1	Lomba Tertib Lalu Lintas	Meraih Piala WTN	Dishub	1 Kegiatan	59.529.870	APBD		1 Kegiatan	70.000.000
2	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Lancarnya Lalu Lintas Kota	Dishub	20 org upah Non PNS, 50 org lembur	1.892.788.930	APBD	Sesuai cascading	12 Bulan	1.900.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

				PNS dan Non PNS					
3	Penerangan/ Penyuluhan Lalu Lintas	Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas	Dishub	30 orang	16.432.600	APBD	Sesuai cascading	12 Sekolah	55.000.000
4	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah pelajar yang terpilih	Dishub	30 peserta	53.466.000	APBD	Sesuai cascading	1 Kegiatan	80.000.000
XI	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikan kendaraan umum			676.390.000				500.000.000
1	Penunjang perasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang di uji kelaikannya	Dishub	12 Bulan	676.390.000	APBD		12 Bulan	500.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perhubungan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas perhubungan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Adapun Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah sebagai berikut :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	6	7
		13.729.941.485	
A	NON URUSAN	3.406.935.900	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.256.935.900	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.350.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan Listrik	101.200.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	150.560.000	APBD
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	154.449.600	APBD
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	APBD
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.219.300	APBD
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.150.000	APBD
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	APBD
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.300.000	APBD
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi	300.000.000	APBD
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	421.200.000	APBD
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	40.507.000	APBD
13	Penyediaan jasa keamanan	0	APBD
14	Pendataan dan penataan arsip	0	APBD
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.945.000.000	

1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.300.000.000	APBD
2	Pengadaan Peralatan Kantor	65.000.000	APBD
3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.000.000	APBD
4	Pengadaan Mebeleur	30.000.000	APBD
5	Pembangunan DED Gedung Kantor	500.000.000	APBD
6	Pemeliharaan Sedang/ Berat Gedung Kantor	0	APBD
7	Pengadaan gedung baru kantor	0	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	105.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	105.000.000	APBD
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	APBD
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	APBD
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	0	APBD
3	Penyusunan Rencana strategis SKPD	0	APBD
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	0	APBD
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan	0	APBD
B	URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN	10.323.005.585	
VI	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	5.839.136.185	
1	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	2.970.000.000	APBD
2	Penunjang Operasional Administrasi UPTD Terminal dan Parkir	252.996.185	APBD
3	Pengelolaan Gedung parkir	516.140.000	APBD

4	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	0	APBD
5	Pengecatan Marka Jalan	0	APBD
6	Pengadaan Road Barrier	0	APBD
7	Pengadaan Rubber Speed Humb	200.000.000	APBD
8	Pengadaan dan Penggantian RPPJ	0	APBD
9	Pengadaan Traffic Cone	0	APBD
11	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	0	APBD
12	Pengadaan Warning Light	200.000.000	APBD
13	Pengadaan Traffic Light	1.500.000.000	APBD
14	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung	200.000.000	APBD
VII	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	700.000.000	
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	700.000.000	APBD
2	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015)	0	
3	Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS (Area Trafic Control System)	0	
VIII	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	500.000.000	
1	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang	0	APBD
2	Penyusunan Kajian Jaringan Induk lalulintas kota Kota	300.000.000	APBD
3	Penyusunan Ranperda Lalu Lintas Darat	0	APBD
4	Pembangunan dan Pengembangan ATCS	0	APBD
5	Kajian Geometrik Persimpangan	0	APBD
6	Pembangunan dan Pengembangan Pedestrian	0	APBD
7	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	200.000.000	APBD
8	Pembangunan Halte	0	APBD

IX	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	585.262.000	
1	Evaluasi Kinerja Angkutan Umum	80.070.000	APBD
2	Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota	380.000.000	APBD
4	Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	13.745.000	APBD
5	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum	9.118.000	APBD
6	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	52.614.000	APBD
7	Pengadaan Stiker Papan Trayek Angkutan	40.000.000	APBD
8	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	9.715.000	APBD
9	Up date data perbengkelan	0	
10	Pemeriksaan lapangan dan pemosesan kartu pengawas angkutan kota	0	APBD
X	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2.022.217.400	
1	Lomba Tertib Lalu Lintas	59.529.870	APBD
2	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.892.788.930	APBD
3	Penerangan/ Penyuluhan Lalu Lintas	16.432.600	APBD
4	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	53.466.000	APBD
XI	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	676.390.000	
1	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	676.390.000	APBD

BAB V

P E N U T U P

Pelaksanaan Program, kegiatan, kebijaksanaan yang telah dirumuskan didasarkan kepada visi dan misi organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, dan tidak lepas dari visi dan misi pemerintah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kota Bukittinggi .

Berdasarkan paparan yang disampaikan pada Bab sebelumnya mengenai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2018 serta rencana program dan kegiatan tahun 2019, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian :

1. Sarana dan prasarana gedung Dinas Perhubungan perlu di rehab dan dibangun baru untuk meningkatkan yang lingkungan kerja yang lebih nyaman
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor di Gadut juga masih merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang di pinjam pakai ke kabupaten agam yang dipakai berdua antara kabupaten agam dan kota bukittinggi, sementara kedua bangunan tersebut memerlukan rehabilitasi dengan dana yang cukup besar, disamping itu peralatan yang digunakanpun memerlukan peremajaan.
3. Beberapa traffic light yang berada di Bukittinggi memerlukan penggantian karna sudah lama (tua).
4. Banyaknya even- even yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi sehubungan dengan Bukittinggi sebagai Kota Wisata, Kota pendidikan dan Kota Perdagangan , memerlukan penanganan lalu lintas yang cepat, tepat dan tidak menimbulkan kemacetan, sementara kendaraan operasional yang ada tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
5. Kurangnya sarana dan prasarana gedung parkir sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Semoga penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2019 ini akan dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi bersama unit kerja, dinas dan instansi terkait serta perangkat kota dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Terima kasih.

Bukittinggi Agustus 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI**



**Drs.ELVI SAHRI MUNIR, M.Si
NIP:196303021986031034**